

**IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MABRUR MELALUI AKAD *MUDHARABAH*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)



Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

EKA HANDAYANI
NPM: 1451020040
Jurusan: Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M

**IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN
MABRUR
MELALUI AKAD *MUDHARABAH*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**
dalam Ilmu **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**EKA HANDAYANI
NPM. 1451020040**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Budimansyah, S TH.I., M. Kom.

I.

Pembimbing II : Sinta Ayu Purnamasari, M. S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)

Oleh:

EKA HANDAYANI

Hadirnya bank syariah dengan produk tabungan haji memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan yang biasanya menggunakan akad *mudharabah* ini juga memberikan peluang kerjasama antara pihak bank dengan nasabah.

Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang? dan bagaimana implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam perspektif ekonomi Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan menjelaskan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dan mengetahui implementasi dan menjelaskan nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, yaitu sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang) yang didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Akad *Mudharabah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang**
Nama : **Eka Handayani**
NPM : **1451020040**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Perbankan Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Budimansyah, S. Th.I. M. Kom. I
NIP. 197707252002121001

Pembimbing II

Sinta Ayu Purnamasari, M. S. I
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

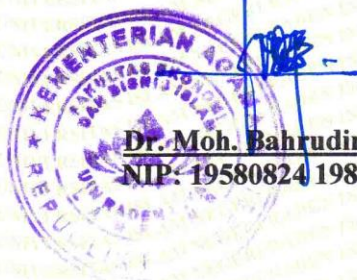
Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD *MUDHARABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)”** disusun oleh **Eka Handayani, NPM: 1451020040**, Jurusan Perbankan Syari’ah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Jum’at, 11 Januari 2019.

TIM MUNAQASAH

Ketua sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I. (.....)
Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I. (.....)
Penguji 1 : Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA. (.....)
Penguji 2 : Budimansyah, S. Th.I., M. Kom. I. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.
NIP: 19580824 1989031003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (المائدة : 2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹



¹ Al Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h. 106.

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kepada makhluk ciptaanNya. Alhamdulillahirobil'amin, pada akhirnya tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Daryati, dan Bapak Subardi yang telah memberikanku kasih sayang, bimbingan, dukungan, serta do'a yang tiada henti yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Adikku tercinta Dias Adelia yang selalu memberikan do'a, motivasi serta membantuku baik secara materi maupun non materi demi keberhasilan menyelesaikan studi.
3. Mahmud Ibnuansyah yang selalu menemani setiap langkah suka maupun duka, memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Eka Handayani lahir di Buay Madang Oku Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan pada tanggal 19 Desember 1995, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Subardi dan Ibu Daryati.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. TK Masthon Sumber Harjo selesai tahun 2007
2. SDN 1 Sumber Harjo selesai tahun 2008
3. SMP N 1 Buay Madang selesai tahun 2011
4. SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah lulus tahun 2014
5. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, November 2018

Eka Handayani
NPm: 1451020040

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit-langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat serta hidayahnya, tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nyadan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya dan cahaya penerang bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan nasihat.
3. Bapak Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I selaku pembimbing I (satu) ditengah kesibukannya, beliau telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Sinta Ayu Purnamasari, M.S.I selaku pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang Asri Andini, Dyah Lestari Excalen Putri Simarintis, Firda Eliani, Fitri Indri Yanti, Ratih Selawati, Regi Narika Putrie, Yeni Apriliana, dan juga seluruh teman seperjuangan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2014 Kelas D UIN Raden Intan Lampung.
7. Sahabat seperjuangan dari kampung Elliana Sundari, Siti Rahayu Wiasti, Sri Rahayu serta adik Ovi Damayanti, Neni Oktaviani yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta kebersamaan penulis selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak Reza Pahlevi Rahmad selaku *Branch Operation and Service* Bank Syariah Mandiri KCP Belitang yang telah bersedia memberi izin penelitian dan pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Ilhamoko selaku *Customer Service* dan Ibu Meiza Putri Lestari selaku *Teller*, beserta seluruh staff pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Belitang yang telah bersedia membantu memberikan informasi dalam rangka terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga atas

motivasi, dukungan serta do'a dari semua pihak menjadi catatan ibadah disisi Allah SWT. Amin

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, November 2018

Penulis

Eka Handayani
NPM.1411060196



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iii
PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Kerangka Pemikiran.....	14
I. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Populasi dan Sampel.....	18
5. Metode Pengumpulan Data	19
6. Metode Analisis Data	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah	23
2. Struktur Organisasi Bank Syariah	24
3. Fungsi Bank Syariah.....	25
4. Tujuan Bank Syariah	27
5. Produk-produk Bank Syariah	28
B. Bagi Hasil	37
1. Pengertian Bagi Hasil	37
2. Sistem Bagi Hasil	42
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	44
C. Tabungan Haji	46
1. Pengertian Tabungan Haji	46
2. Sistem Komputerisasi Haji	49
3. Pengelolaan BPIH	51
D. <i>Al-Mudharabah</i>	53
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	53
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	61
3. Karakteristik dan Manfaat <i>Mudharabah</i>	65
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	68
5. Resiko dan Berakhirnya	70

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri	73
1. Sejarah berdirinya PT Bank Syariah Mandiri Belitang.....	73
2. Profil PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	76
3. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.....	76
4. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	78
5. Produk dan Layanan PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.....	79
B. Mengenal Produk Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri.....	81
1. Pengertian Tabungan Mabrur	81
2. Ketentuan Umum Mengenai Tabungan Mabrur.....	82
3. Manfaat Tabungan Mabrur	84
4. Fitur Tabungan Mabrur	84
5. Persyaratan Tabungan Mabrur	84
6. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Mabrur	85

BAB IV ANALISI DATA

A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang	92
---	----

B. Penerapan Bagi Hasil Tabungan Mabror Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam Perspektif Ekonomi Syariah	94
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Data Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	8
1.2 Penelitian Terdahulu	11
2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	38
3.1 Nama Produk Simpanan Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.....	79
3.2 Nama Fasilitas Jasa Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	80
3.3 Jumlah Nasabah Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang..	88
4.1 Jumlah Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	89
4.2 Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	97
4.3 Ringkasan Hasil Deskripsi Data Produk Tabungan Haji <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri KCP Belitang	103

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1 Kerangka Wawancara *Customer Service*
- Lampiran 2 Kerangka Wawancara Nasabah
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang
- Lampiran 5 Laporan Keuangan Bulanan Bank Syariah Mandiri
- Lampiran 6 Blanko Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Permohonan Pra Riset
- Lampiran 8 Surat Permohonan Riset
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 10 Berita Cara Munaqasah
- Lampiran 11 SK Pembimbing
- Lampiran 12 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Tabungan
- Lampiran 13 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Lampiran 14 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000
Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan
Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* Melalui Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.**

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut, menurut buku kumpulan kosa kata bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktik sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun

nilai, dan sikap.² Hal ini berhubungan dengan penerapan atau pelaksanaan dalam suatu sistem baik kerja sama maupun mitra.

2. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah sistem dalam pembagian pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam aplikasi perbankan syariah untuk dana simpanan, nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Sedangkan untuk pembiayaan atau penyaluran dana, bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah atau mitra sebagai *mudharib*.³

3. Tabungan Maburur

Tabungan Maburur adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.⁴

4. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.⁵ Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha berekonomi

² E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi)* Ct. 9 (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5.

³ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2012), h. 31.

⁴ Ilhamoko, wawancara dengan customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang pada tanggal 26 April 2018.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2013), h. 69.

dengan cara yang benar dan adil yang menguntungkan satu sama lain.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif

- a. Bagi penulis pentingnya meneliti atau menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang pola kerjasama yang dijalankan Bank Syariah Mandiri, dimana dalam kemitraan yang dijalankan tersebut menerapkan pola kemitraan syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang terhadap nasabah bank tersebut.
- b. Secara teori sistem bagi hasil, merupakan salah satu akad atau kesepakatan kerja sama dimana pihak pertama (*Shohibul maal*) sebagai pemilik modal dan pihak kedua (*Mudharib*) sebagai pengelola usaha, dengan didasarkan atas keridhaan kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kerja, dan tanpa adanya unsur paksaan dalam menjalankan usaha tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang sistem bagi hasil dalam kerjasama akad *mudharabah*, serta bagaimana aplikasi dalam realita atau rillnya.
- b. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya, selain itu juga data yang dihasilkan dari lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah atau Bank Islam, seperti halnya bank umum lainnya (*konvensional*) berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan pada prinsip syariah.⁶ Berdasarkan fungsi tersebut semakin lama semakin berkembang inovasi-inovasi perbankan dalam menawarkan produk dan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Lembaga perbankan bukan hanya sebagai tempat menabung dan sumber kredit melainkan juga memberikan pelayanan jasa keuangan, dimana saat ini perbankan berlomba-lomba dalam memberikan layanan yang memungkinkan transaksi sehari-hari. Inovasi layanan perbankan yang di tawarkan berupa layanan penghimpunan dan penyaluran dana serta bentuk layanan jasa.

Bank Syariah dalam memberikan layanan penghimpunan dana dari nasabahnya salah satunya adalah penghimpunan dananya adalah dalam bentuk tabungan. Salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah adalah tabungan haji. Tabungan ini untuk merespon kebutuhan masyarakat Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia.

⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) dan (13)

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (bulan *Zulhijjah*).⁷ Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam.

Hadirnya Bank Syariah dengan produk tabungan haji ini memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan yang biasanya memakai akad *mudharabah* ini juga memberikan peluang kerjasama antara pihak bank dan masyarakat.

Seperti yang diketahui akad *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Dimana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁸ *Mudharib* berkewajiban mengelola dana yang diberikan dari *shohibul maal*.

Keuntungan atau nisbah akan ditentukan diawal akad atau perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari akumulasi keuntungannya, adapun dalam ekonomi Islam bagi hasil yang diisyaratkan misal


⁷ A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 209.

⁸ Mumuhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 90.

presentasinya yaitu 60% : 40%, artinya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal, atau 50% : 50%.⁹

Pembagian keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil atau *nisbah*. Sistem bagi hasil (*profit sharing*) ini lebih adil daripada sistem bunga bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram, sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(البقرة: 275) 

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”¹⁰

⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 17.

¹⁰ Al Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h. 47.

Tujuan Islam mengharamkan riba adalah karena mengandung unsur penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat, padahal Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu.¹¹ Dengan melarang riba, Islam juga berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan usaha yang dimodalinya.¹²

Pembagian keuntungan yang sah dan dapat diterima menjadi fondasi pengembangan dan implementasi perbankan syariah. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat oleh pelaksana usaha. Sistem bagi hasil dibolehkan dalam Islam karena yang ditetapkan sebelumnya adalah rasio bagi hasil, bukan tingkat keuntungan seperti yang berlaku dalam sistem bunga.

Bank Syariah Mandiri KCP Belitang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan *mabrur*. Tabungan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji,

¹¹ Amir Mahchmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 10.

¹² Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, terjemahan Burhan Subrata (Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA, 2007), h. 79.

akan tetapi selalu terbentur biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Berikut jumlah nasabah tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang:

Tabel 1.1
Data Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur
Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang

Tahun	Jumlah Nasabah
2013	470
2014	430
2015	400
2016	371
2017	358

Sumber: Data pembukaan rekening tabungan Mabrur Pada BSM KCP Belitang

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat disimpulkan pembukaan buku tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang justru mengalami penurunan jumlah nasabah, ini dikarenakan dana talangan haji tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah. Pihak Bank Syariah tetap memberikan nisbah bagi hasilnya kepada nasabah dengan kesepakatan bersama dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu, tabungan dengan sistem bagi hasil dimana

nasabah sebagai pihak pemilik dana dan bank sebagai pihak pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya kepada pihak bank, kemudian bank mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah tanpa ada ketentuan jenis usaha dari nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur melalui akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang kedalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* Melalui Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang ?
2. Bagaimana implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dan menjelaskan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.

2. Untuk mengetahui implementasi dan menjelaskan nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian (*karya ilmiah*) yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula pada hasil penelitiannya. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan atau dapat bermanfaat baik untuk kepentingan praktisi maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada Perbankan Syariah, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur dan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, serta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah Mandiri baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini membantu peneliti dalam meninjau kajian teoritis dengan pengalaman aplikatif.

b. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang atas akad *mudharabah mutlhaqah* pada tabungan *mabrur*

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang bagi hasil, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini masih kurang mendapat perhatian. Tema tentang nisbah bagi hasil pada tabungan dengan akad *mudharabah* belum banyak dikaji oleh para mahasiswa, namun demikian sudah ada beberapa yang membahasnya dalam sebuah skripsi.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul penelitian	Hasil atau temuan	Metode yang digunakan
1	2014	Akhlis Farida	Analisis Pada	Memberikan gambaran	Deskriptif kualitatif

		Kurnia Rahma ¹³	Produk Tabungan Baitullah iB Hasanah di BNI Syariah	karakteristik tabungan baitullah ib hasanah serta strategi pemasaran yang digunakan di bank BNI syariah tersebut.	
2	2014	Pandu Panuntun ¹⁴	Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan haji BRI Syariah Jakarta	Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan haji mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i>	Kualitatif
3	2016	Dias Wahyuningsih ¹⁵	Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal	Memberikan gambaran bahwa pada BMT tersebut sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai ketentuan BMT El-Amanah dan meninjau kepuasan nasabah	Kualitatif
4	2016	Yosep Baskoro Widiasto ¹⁶	Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Jasa	Memberikan gambaran hukum positif, yaitu peraturan	Hukum Normatif

¹³ Akhlis Farida Kurnia Rahma, "Analisis pada Produk Tabungan Baitullah iB Hasanah di BNI Syariah", Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, (Semarang: STAIN Salatiga, 2014), h. 10.

¹⁴ Pandu Panuntun, "Penerapan bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Cabang Jakarta", skripsi Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah, Program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h. 6.

¹⁵ Dias Wahyuningsih, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal", skripsi program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo, 2016), h. 4.

¹⁶ Yosep Baskoro Widiasto, "Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Jasa Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia Yogyakarta", Jurnal Program kekhususan hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas ATMA JAYA, 2016), h. 1.

			tabungan Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	perundang-undangan tentang sistem bagi hasil dalam jasa tabungan dan menunjukkan bahwa tabungan ib hasanah dengan akad mudharabah sudah menerapkan prinsip syariah, sedangkan tabungan ib hasanah dengan akad wadiah belum menerapkan sistem syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah	
5	2016	Jalaludin Mustafa ¹⁷	Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji iB MEGA Syariah KC Semarang	Menunjukkan bahwa pada produk tabungan haji iB Mega Syariah KC Semarang telah menggunakan akad mudharabah muthlaqah	Kualitatif

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melihat hasil temuan yang dilakukan bahwa sistem bagi hasil produk tabungan haji yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di

¹⁷ Jalaludin Mustafa, "Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji IB Mega Syariah KC Semarang", Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 1.

Indonesia sebagian besar sudah terlaksananya sesuai prinsip syariah. Meskipun penggunaan akad masih ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah tersebut. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tentunya ada persamaan dan perbedaan baik hal pembahasan maupun objek kajian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Persamaan

Penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil produk tabungan haji, mulai dari karakteristik tabungan haji, pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan haji tersebut.

2. Perbedaan

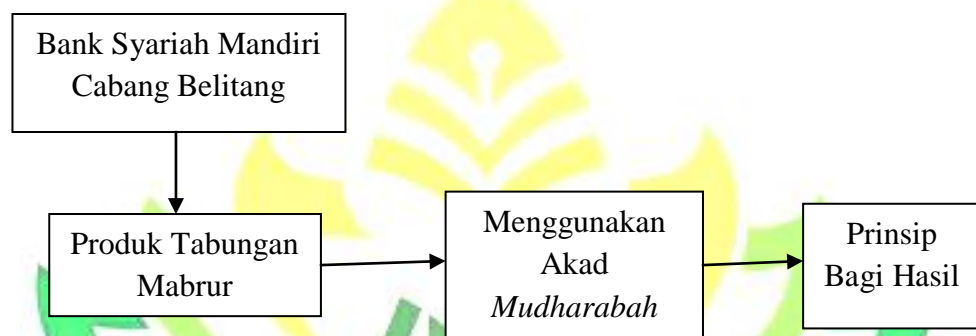
Penelitian ini membahas tentang penerapan nisbah bagi hasil produk tabungan haji melalui akad *mudharabah*. Gambaran proses perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

H. Kerangka Pemikiran

Tingginya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji sehingga menciptakan inovasi baru dalam dunia perbankan yaitu Produk Tabungan Haji, salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dengan mengeluarkan produk tabungan haji dengan nama Tabungan Mabrur. Tabungan Mabrur ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (nasabah) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (bank), kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembagian hasil usaha di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dikenal dengan istilah

bagi hasil. Penentuan bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah tersebut dengan perbandingan persentase 15% : 85%, dimana 15% untuk pihak nasabah dan 85% untuk pihak bank syariah. Bagi hasil tersebut didistribusikan setiap bulannya sesuai pendapatan bank yang diperoleh atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar. 1

Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pembahasannya memerlukan pengumpulan data dari penapsiran kata-kata.¹⁸

Melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan

¹⁸ Cholid Nuroboko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h. 1.

masalah. Metode yang tepat maka akan menghasilkan karya ilmiah yang baik juga. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis diantaranya:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.¹⁹ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lain yang berkaitan dengan analisis penerapan akad *mudharabah mutlaqah* untuk biaya perjalanan ibadah haji. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.²⁰

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu studi untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat.²¹ Penelitian ini dilakukan semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil keadaan

¹⁹ *Ibid.*, h. 7.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 2* (Yogyakarta: AndLOffset, 1990), h. 136.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (cet. X) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 74-75.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Pengertian deskriptif kualitatif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan tentang nisbah bagi hasil pada produk tabungan mabrur melalui akad *mudharabah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.

2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat tujuan dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang yang beralamatkan di Jl. Indah No. 5 Pasar Lama Gumawang Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilakukan terhitung enam bulan mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian dengan turun langsung kelapangan baik data yang diperoleh dari individu atau kelompok, seperti data hasil wawancara.²² Data primer dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.²³ Data sekunder juga merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari

²² *Ibid.*, h. 86.

²³ *Ibid.*, h. 87.

pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, contohnya: karangan dalam bentuk buku, teori-teori, jurnal nasional dan internasional maupun internet (data dalam sumber bacaan).

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan jumlah subjek yang diteliti.²⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah tabungan mabrur tahun 2017 berjumlah 358 nasabah dengan akad *mudharabah* yang menjalani bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.
- b. Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sampel juga dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁵ Penentuan jenis sampel (*responden*) didasarkan dengan pertimbangan bahwa unit sampel yang dipilih tersebut dapat mewakili gambaran populasinya.²⁶ Teknik *sampling* yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, disebut demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak sama

²⁴ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 129.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE UII, 2001), h. 65.

kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.²⁷

Sedangkan menentukan besar kecilnya sampel, penulis berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu misalkan sekedar encener-encer, apabila banyak populasi kurang dari (<)100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian merupakan populasi. Selanjutnya jika jumlahnya sangat banyak dan besar, cukup diambil antara 10% sampai 15%, 25% atau lebih.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 10%, artinya $10\% \times 358 \text{ populasi} = 38$ orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. *Interview* / wawancara

Interview / wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewner*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. *Interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas, *interview* terpimpin dan *interview* bebas tidak terpimpin.

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 111.

²⁸ *Ibid.*, h. 104.

- a. *Interview* bebas yang maksud adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.
- b. Jenis *interview* terpimpin atau disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya baik oleh pewawancara ataupun narasumber.
- c. *Interview* bebas tidak terpimpin artinya pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang didalam pelaksanaanya pewawancara telah membawa dasar perihal apa-apa yang ditanyakan dengan garis besar.

2. Observasi

Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpuan pada pengamatan langsung pada objek penelitian. Pengamatan langsung dilapangan ini akan memperoleh data yang objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang cukup luas.

Bimo Walgito menyatakan bahwa observasi merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data. Selanjutnya Sutrisno Hadi mengemukakan observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.²⁹

²⁹ Sutrisno Hadi, *Op.cit.*, h. 72.

Dalam hal ini observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai bagi hasil pada produk tabungan mabrur dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

- a. Profil perusahaan yang berisi gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Belitang.
- b. Rekaman wawancara dengan Bapak Ilhamoko selaku *customer service* Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Belitang.
- c. Serta hal-hal yang bersangkutan dengan pengumpulan data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diadakan kategorisasi, serta klasifikasi sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah. Teknis analisis data yang dipakai dalam menganalisa data kualitatif yakni dimulai dengan analisa teoritis tentang nisbah bagi hasil dengan akad *mudharabah*, kemudian data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) dan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang di analisis

³⁰ Sugiono, *Op.cit.*, h. 240.

berdasarkan permasalahan yang sedang dibahas. Teknik analisis data ini menggunakan:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data dengan demikian, akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.³¹ Teknik analisis data ini disebut dengan metode *data display* (Penyajian Data), yakni yang bertujuan untuk memudahkan serta memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

³¹ Sugiono, *Op. Cit.*, h. 249.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW,³² yaitu sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة : 283)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³³

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2.

³³ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004),

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

Jadi, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa perbankan lainnya yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang telah diatur dalam syariah Islam yaitu terbebas dari hal-hal yang mengandung unsur kedzaliman, riba (bunga), *maisyrir* (spekulasi), gharar (ketidak jelasan), serta terbebas dari perkara yang bathil.

2. Struktur Organisasi Bank Syariah

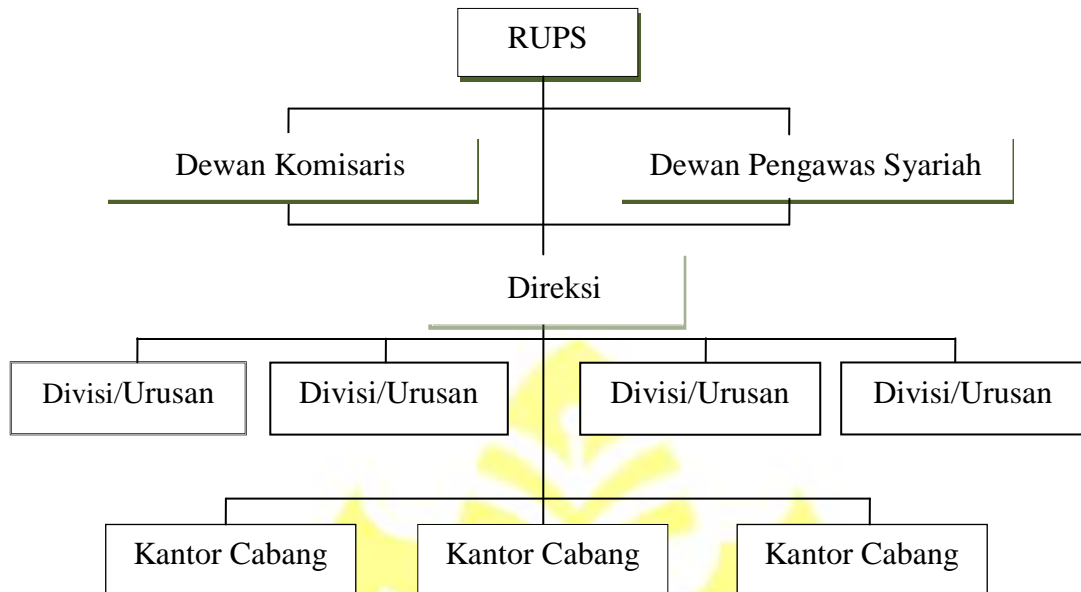
Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengurus Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.³⁵ Berikut adalah contoh struktur organisasi dari bank syariah:³⁶

³⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktik*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 21.

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 41.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 11.

Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Gambar 2
Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Sumber: Bank Indonesia (2001)

3. Fungsi Bank Syariah

Beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema yang dimiliki dalam skema *non-riba* memiliki setidaknya empat fungsi yaitu:³⁷

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan

³⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 48.

keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen Qardhul Hasan.³⁸

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya.

³⁸ *Ibid.*, h. 50.

Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

4. Tujuan Bank Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah yang diutarakan dalam berbagai pendapat diantaranya yaitu:

Menurut Kazarian tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dalam hal ini bank syariah lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim.³⁹

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴⁰

Sementara itu para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan

³⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

⁴⁰ Rizal Yaya, *Loc. Cit.*, h. 52.

pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial.⁴¹

Jadi tujuan dari bank syariah adalah memberikan fasilitas keuangan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak yaitu antara golongan surplus dan golongan defisit agar kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu golongan saja. Tujuan dari bank syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam dimana sistem keadilan dijunjung tinggi dan lebih mementingkan kesejahteraan bersama sehingga tidak terlalu berfokus kepada profit yang akan didapatkan.

5. Produk-produk Bank Syariah

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk penghimpunan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan.

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁴²

⁴¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 33.

⁴² Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDI PERSADA. 2007), h. 107.

1) Prinsip *Wadi'ah* (Titipan)

Al-Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *al-Wadi'ah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-Wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.

Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.⁴³ Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan yaitu bank harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkannya.⁴⁴ Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box* (SDB).

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2011), h. 59.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 60.

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, akad *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.⁴⁵ Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan simpanan berdasarkan *wadi'ah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁶

2) Prinsip *Mudharabah* (Bagi hasil)

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai bertindak sebagai pengelola modal. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk

⁴⁵ *Ibid.*, h. 63.

⁴⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakan untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.⁴⁷

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip *jual beli*,

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *murabahah*

Ba'i al-murabahah (al-ba'i bi tsaman ajil) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2014), h. 31.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GEMA INSANI. 2001), h. 101.

b) *Ba'i As-Salam (In-Front Payment Sale)*

Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

c) *Ba'i al-istishna*

Transaksi *ba'i al-istishna* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan di muka, tengah maupun akhir. *Ba'i al-istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur.

2) Pembiayaan dengan prinsip *sewa*,

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁹ Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).⁵⁰ Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pembiayaan dengan prinsip *bagi hasil*,

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, h. 117.

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, h. 101.

- a) *Musyarakah*, adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua belah pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- b) *Mudharabah*, adalah kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola modal dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.

4) Pembiayaan dengan *akad pelengkap*.

Upaya mempermudah pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Berikut yang termasuk akad pelengkap, antara lain:

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Al-hiwalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya.⁵¹ Tujuan fasilitas ini adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Dalam akad *al-hiwalah*, terdapat tiga pihak yang terkait antara lain: *muhal* (pemberi pinjaman), *muhil* (penerima pinjaman), dan *muhal alaih* (penerima pinjaman dari muhil).

b) *Rahn* (Gadai)

Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa

⁵¹ Ismail, *Op.Cit.*, h. 206

ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemeliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik nasabah sendiri,
- 2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar,
- 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c) *Qardh*

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji,
- 2) Sebagai pinjaman tunai,
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil,
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C, inkaso dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Al-kafalah merupakan jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) *Sharf* (Jual beli Valuta Asing)

Merupakan pelayanan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara valas dan rupiah dibolehkan apabila pertukaran ini tidak ditujukan untuk spekulasi. Arti harfiah *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.

2) *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodion*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

B. Bagi Hasil

Bagi hasil atau *Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW, sejak zaman jahiliyah sebelum Islam. Namun saat itu Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Seperti halnya Nabi Muhammad yang bekerja dengan Siti Khadijah seorang saudagar kaya saat itu, Nabi pergi ke Negri Syam untuk berdagang atau berniaga dari barang-barang milik Siti Khadijah, dengan ketentuan bagi hasil.

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵²

⁵² Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37.

Bagi hasil adalah bentuk *retrun* dari kontrak investasi, dan waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan *nisbah* adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁵³ Muhammad menjelaskan pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lain dijamin keuntungannya.⁵⁴ Hal ini mengidentifikasi perbankan syariah menganut sistem bagi hasil dalam proses kegiatannya dan mengharamkan bunga karena mengandung unsur riba. Berikut perbedaan bunga bank dengan bagi hasil :

Tabel 2.1
Perbedaan Bagi hasil dengan Bunga

Bagi Hasil	Bunga
a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi
b. Besarnya rasio bagi hasil	Besarnya persentase berdasarkan

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 90.

⁵⁴ Muhammad, *Op. Cit*. h. 121.

berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan
c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam

Sumber: (Antonio dan Karnaen: 1992, 52)

Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:

- 1) Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah kemudian bank sebagai pengelola akan mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk usaha-usaha yang baik secara profesional.
- 2) Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana maupun bank.
- 3) Prinsip ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam, antara lain

tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, dengan demikian nasabah akan merasakan ketrentaman lahir maupun batin.

Distribusi pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah penghimpun dana hanya didasarkan pada akad *mudharabah*. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad.⁵⁵

Penentuan dalam bagi hasil berbentuk persentase atau biasa disebut nisbah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak dan pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Nisbah harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan masing-masing porsi pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

Hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil sebagai berikut:

1) Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50%:50%, 70%:30%, 60%:40% atau 55%:45%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

⁵⁵ Wiroso, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2005), h. 89.

2) Bagi untung atau bagi rugi

Dalam kontrak ini, *return* dan *ining cash flow* kita tergantung kepada kinerja riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nasabah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam nominal rupiah tertentu.

3) Menentukan besarnya nisbah keuntungan

Besarnya nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar-menawar antara *shohib maal* dengan *mudharib*.

Prakteknya dalam perbankan modern, tawar menawar nisbah hanya terjadi pada deposit dengan jumlah besar karena memiliki daya tawar relative tinggi (*special nisbah*). Sedangkan untuk deposit kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit boleh setuju atau tidak. Bila tidak setuju, nasabah dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.⁵⁶

2. Sistem Bagi Hasil

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-Mui/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

⁵⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 206-209.

dikatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada sistem *profit sharing* dan *revenue sharing*.⁵⁷ Ketentuan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah).
- b. Dilihat dari kemaslahatan (*al aslah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- c. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berikut ini adalah penjelasan dari sistem bagi hasil yang terdapat pada perbankan syariah:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵⁸ Pendapatan-pendapatan tersebut diatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi antara

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

⁵⁸ Tim Pengembang Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Praktek dan Implentasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 264.

bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai nisbah yang diperjanjikan.

Sistem *profit sharing*, dimana bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shohibul maal* akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan danya ke bank syariah, yang berdampak pada jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Sistem *profit sharing*, apabila dipertahankan dalam memperhitungkan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko tersebut diatas adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dana porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Dengan kata lain bank mengurangi porsi bagi hasil yang mereka peroleh untuk menutupi kekurangan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah (deposan).

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵⁹

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dan pengelola dana (penyaluran) sebesar porsi dan *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan bank syariah.⁶⁰

Revenue sharing, dimana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dan total pendapatan bank sebelum dikurang pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya bank, maka oleh pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan total dan pihak ketiga bank syariah.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi hasil

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam perbankan Islam adalah:

⁵⁹ *Ibid.*, h. 265.

⁶⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2015), h. 121.

a. Faktor langsung

- 1) *Investasi rate*, merupakan total dana yang di investasikan.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan tersebut dapat di hitung dengan rata-rata total saldo harian.
- 3) Nisbah, merupakan satu ciri khas dari investasi *al-mudharabah*.

b. Faktor tidak langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
- 2) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendaptan diterima dikurangi baiya-baiya.
- 3) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 4) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁶¹

⁶¹ Muhammad Syafi'i antonio, *Op. Cit.*, h. 237-238.

C. Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁶²

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *liquid*, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan.

penghimpunan yang lain.⁶³ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau *investasi* dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti halnya dengan salah satu bentuk tabungan yang khusus digunakan untuk ibadah haji.

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian. Tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah. Biaya untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000 (tahun 2018). Jika saldo di tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.500.000 (untuk saat ini) maka secara sistem akan di daftarkan ke SISKOHAT Kementerian Agama.⁶⁴

Sesuai Surat Keterangan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/146 tahun 1998 tanggal 13 Agustus 1998, Tabungan Haji

⁶³ M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2012), h. 34.

⁶⁴ Website resmi PT Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 21.00 WIB.

dalam pelaksanaanya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh, akad *mudharabah mutlaqah* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar.

Unsur-unsur yang menunjukkan *mudharabah mutlaqah* (*general investment*) adalah:

- a. *Shohibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberikan wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis layanannya.
- b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.



Gambar 3
Akad *Mudharabah Muthlaqah*

Tabungan haji yang dikeluarkan bank-bank, baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai beberapa keuntungan bagi pihak penabung, bank maupun untuk

perekonomian.⁶⁵ Dimana pihak bank sebagai pengelola dana yang diberikan oleh pihak nasabah. kemudian pihak bank akan memberikan nisbah bagi hasilnya kepada nasabah. Besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada anggota (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung dari kesepakatan pada saat terjadinya akad antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.⁶⁶

2. Sistem Komputerisasi Haji

Salah satu bagian yang sangat berperan dalam sistem pengelolaan BPIH adalah Siskohat yang dapat dikatakan sebagai subsistem yang sangat berperan didalam mengelola data penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Siskohat adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kominikasi yang dilakukan di tanah air maupun di Arab Saudi.⁶⁷

Siskohat dibangun untuk memberikan kemudahan, kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji Nasional secara tersistem, kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil untuk memperoleh nomor porsi haji. Siskohat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting

⁶⁵ Hasan Ali, M Nadratuzzaman, *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 94.


⁶⁶ Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 87.

⁶⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji pasal 1.

dan dominan dalam pengelolaan BPIH khususnya berkaitan dengan masalah data jamaah haji serta masalah dan siskohat ini juga sangat menunjang keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Siskohat menjadi sarana untuk mendata pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh database jamaah haji. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar sesuai urutan dengan prinsip *first come first served*. Proses pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time. Database pendaftaran yang tersimpan di siskohat juga dapat difungsikan untuk mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen, mempercepat pengelompokan pramanifes kloter, kepastian pengeluaran Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji di Embarkasi, mempermudah akuntansi dan pelaporan BPIH serta Living Cost, acuan pembuatan identitas jamaah haji, penyediaan akomodasi, konsumsi di embarkasi maupun di Arab Saudi serta sebagai alat kontrol dalam memfilter berbagai penyalahgunaan data jamaah haji. Siskohat juga berfungsi menyimpan database yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen pasport bagi jamaah haji dan mempercepat pemvisaan secara online dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Jakarta.

3. Pengelolaan BPIH

BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah. Didalam ketentuan Undang–Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa: Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut :⁶⁸

- 
- a. Penetapan BPIH
 - b. Pembinaan Ibadah Haji
 - c. Penyediaan Akomodasi yang layak
 - d. Penyediaan Transportasi
 - e. Penyediaan Konsumsi
 - f. Pelayanan Kesehatan
 - g. Pelayanan Administrasi dan Dokumen.

Ketentuan tersebut di atas yang terkait dengan penggunaan BPIH adalah pembinaan haji, pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi dan dokumentasi.

Penyelenggaraan ibadah haji tentunya ada hal yang tidak diduga terjadi menimpa jamaah haji baik pada saat masih ditanah air sebelum berangkat ke tanah suci maupun selama berada di tanah suci sehingga pada perjalanan pulang ketanah air yaitu adanya

⁶⁸ Undang–Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2) tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

jamaah yang meninggal dunia ataupun ada jamaah haji yang batal berangkat karena alasan kesehatannya terganggu.

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5 dinyatakan bahwa:⁶⁹

- a. Calon jamaah haji dinyatakan batal karena
 - 1) Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji
 - 2) Alasan kesehatan atau alasan lainnya yang sah
- b. Calon jamaah haji batal baik yang berstatus penabung maupun sudah melunasi BPIH porsinya ditempati oleh penabung atau calon jamaah haji yang terdaftar pada nomor urut selanjutnya sesuai database SISKOHAT
- c. Calon jamaah haji batal berhak memperoleh pengembalian BPIH dengan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 1% s.d 5%.

Khusus kepada jamaah haji yang belum berangkat bilamana terjadi kedua hal tersebut maka terhadap BPIH baik setoran awal BPIH maupun pelunasan BPIH harus dikembalikan kepada ahli warisnya bagi jamaah haji yang meninggal dunia karena jamaah haji yang bersangkutan belum sempat menunaikan ibadah haji sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dimanfaatkan untuk kepentingan Jamaah yang bersangkutan

⁶⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5.

sehingga wajib bagi Menteri Agama melalui bank penerima setoran mengembalikan BPIH Jamaah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

D. Al-Mudharabah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara etimologis *Mudharabah* memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian, sedangkan secara terminologis *Mudharabah* adalah suatu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan jika terjadi kerugian secara normal (faktor alam) maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dan pemilik modal tidak boleh investasi kepada pengelola modal.⁷⁰

Bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini, yaitu: *Qiradh*, *Muqaradhadh*, dan *Mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang menonjol, hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari faktor geografis (tempat penerapannya), seperti misal Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hambal di Irak lebih menggunakan istilah *Mudharabah*, sebaliknya Imam Maliki dan Syafi'i lebih condong menggunakan istilah *Qiradh* dan *Mudharabah*.

⁷⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 195.

Adapun dalam buku *Fiqh Muamalah* juga menegaskan bahwa *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qiradh*, atau *muqaradhah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut:⁷¹

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pemilik (orang) asing menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan pihak lain punya jasa mengelola harta tersebut.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa, *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya pada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembiayaan yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 136.

untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁷²

Menurut PSAK 105 paragraf 4, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁷³

Mudharabah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.⁷⁴

Jadi, dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan keduanya, atau dapat dipahami juga bahwa *mudharabah* pada dasarnya yakni terletak

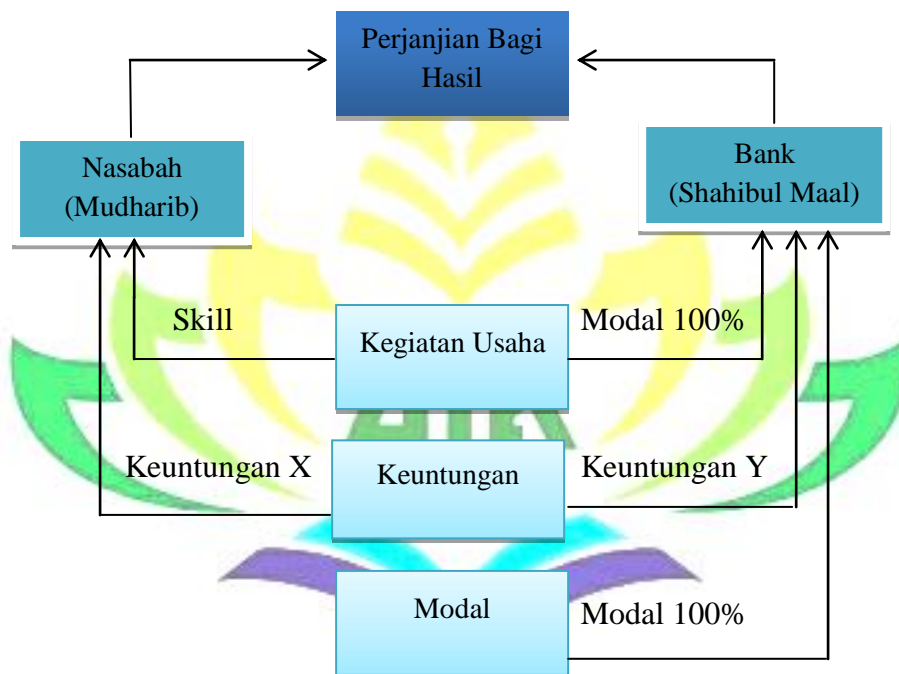
⁷² *Ibid.*, h. 137.

⁷³ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 148.

⁷⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 212.

pada kerjasama yang baik antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakteristik masyarakat ekonomi Islam.

Secara umum, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar. 2
Akad *Mudharabah*

Keterangan:

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara dua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Contoh praktek di bank, seorang pedagang / nasabah yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank

bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pedagang/ nasabah bertindak sebagai pengelola(*mudharib*) dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dasar hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah), yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾
(البقرة : 198)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁷⁵

Dapat ditegaskan bahwasanya Nabi pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negri Syam (saat itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dalam *Al-Muaththa'* Imam Malik, dari Al-A'la Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dan dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a, sedang keuntungannya dibagi dua.

⁷⁵ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan. Op.Cit., Al-Baqarah (2) : 198.*

b. Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Imam Baihaqi).⁷⁶

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ
الْبُرِّ لِشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib no. 2280, kitab at-Tijarah).⁷⁷

a. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara

⁷⁶ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *sunan al-baihaqi*, (Digital library), al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005, II/421, hadis Nomor 11945.

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *sunan Ibni Majah*, (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/163, hadis Nomor 2377.

mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.⁷⁸

“Rasulullah SAW, telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.”

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal.

Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

- 1) Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah.⁷⁹
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.⁸⁰
- 3) Peraturan Bank Indonesia⁸¹
- 4) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transpransi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

⁷⁸ Antonio, 2001. *Op.Cit.*, h. 95-96.

⁷⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 195.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 197.

⁸¹ Muhammad, 2015, *Op. Cit.*, h. 43.

- 5) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya.
- 6) PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 dan 7.⁸²
- 7) SE.BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bagian III angka 1.⁸³

Mudharabah atau *qiradh* menurut Ibn hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan pelajaran ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a kemudian menjadi istri beliau.⁸⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami, bagi hasil atau *mudharabah* memang telah ada sejak sebelum Islam datang dan tersebar luas di muka bumi, adapun alasan mengapa bagi hasil atau *mudharabah* dibolehkan karena dari beberapa hal yang dicontohkan oleh nabi Muhammad sebelumnya.

⁸² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 223.

⁸³ *Ibid.*, h. 225.

⁸⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 114.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)⁸⁵

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada. Dengan sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut sebagai berikut:

a) Hak pekerja (pengelola)

- (1) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- (2) Modal yang digunakan sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- (3) Kedudukan pekerja sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.

⁸⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117.

(4) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi maka dia berhak mendapat upah.

(5) Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di luar kota lain yang jauh, maka ia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b) Hak Pemilik Modal (*shahibul maal*)

(1) Keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.

(2) Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

Sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan sebagai pengelola (*mudharib*) maka dalam menjalani kerjasama tersebut ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh keduanya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, maka keduanya harus memenuhi hak-hak seperti beberapa hak-hak di atas.

2) Objek *mudhrabah* (modal dan kerja)

Objek *Mudharabah* adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk

uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

Tidak dibolehkan dalam *mudharabah* adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana,

sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.⁸⁶ *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁸⁷

b. Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:⁸⁸

- 1) Terkait dengan akad,
- 2) Terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 119.

⁸⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 205-206.

⁸⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 155.

3) Yang terkait dengan modal, disyaratkan, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/ pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).⁸⁹

Dalam melakukan suatu kerjasama bagi hasil *mudharabah* maka hendaknya kedua belah pihak yang menjalani kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ada di atas.

3. Karakteristik dan Manfaat *Mudharabah*

Diketahui bahwa salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang atau pengelola modal adalah bagi hasil, yang dilandasi dengan rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang memiliki modal, tetapi dia tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan, ada juga orang yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha tersebut, maka keduanya bisa saling memanfaatkan

⁸⁹ Naf'an, 2014, *Op.Cit.*, h. 118.

kemampuan dan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha dengan dasar bagi hasil.

Definisinya bagi hasil disebut adanya “keuntungan atau nisbah bagi hasil yang disepakati”, maka dalam transaksinya karakteristik *mudharabah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa karakteristik yang menonjol pada kerjasama bagi hasil yaitu terletak pada modal dan keuntungan yang dibagi hasilkan, karena dalam Islam sangat menghindari adanya dana yang dianggarkan maka Islam menganjurkan untuk menjadikan dana tersebut produktif.

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan pada manusia, terkadang sebagai orang yang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduksinya, dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduksinya.⁹⁰ Karena itu, syari'at membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib*, sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan

⁹⁰ Imam Mustofa, *Loc. Cit.*, h. 154.

harta. Dengan demikian terciptalah kerjasama antara *modal* dan *kerja*.

Adapun manfaat *al-mudharabah* dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendana secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga tidak pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif atau hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil atau *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi ataupun krisis ekonomi.

Dalam menjalani satu pekerjaan tentu mengundang hikmah, dalam pekerjaan tersebut terdapat hikmah-hikmah yang baik,

seperti halnya beberapa hikmah dalam menjalani kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* di atas.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah mutlaqah yaitu *mudharabah* tanpa syarat maksudnya bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.⁹¹

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, maksudnya kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan

⁹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 68.

3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.⁹²

Dalam kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* ini terdapat juga beberapa jenis-jenis bagi hasil atau *mudharabah* maka hendaknya kedua belah pihak yang menjalin kerjasama menentukan jenisnya untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pembagian hasil kerjasama yang di sepakati seperti jenis-jenis di atas.

5. Resiko dan Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Resiko yang terdapat pada *mudharabah*, terutama pada penerapannya relatif tinggi⁹³, diantaranya:

- a. *Slide streaming*, pengelola dana menggunakan modal tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak atau kesepakatan.
- b. Lalai atau kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh pengelola bila pengelola tidak jujur.

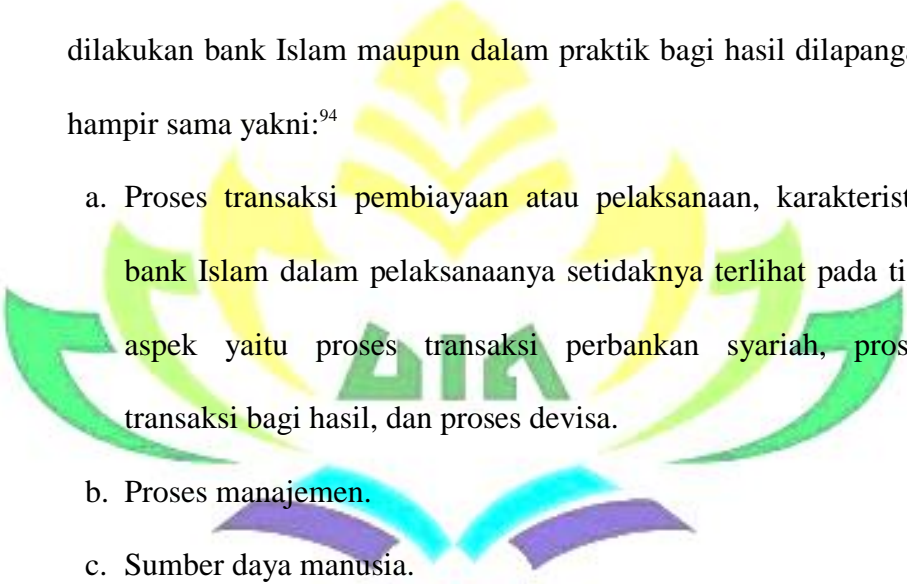
Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil atau *mudharabah*, maka terdapat beberapa resiko yang kemungkinan besar akan terjadi maka pemilik dan pengelola dalam melaksanakan praktik bagi hasil atau *mudharabah* tersebut harus memenuhi tuntunan rukun dan syarat dalam akad bagi hasil atau *mudharabah*. Dalam bagi hasil apabila terjadi kerugian yang terjadi dalam pelaksanaanya maka

⁹² Antonio, 2001. *Op.Cit.*, h. 97.

⁹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 98.

kerugian tersebut akan di tanggung secara bersama, tidak bisa hanya memebankan kepada pemilik modal atau pengelola modal saja.

Sedangkan untuk menghindari atau mengantisipasi resiko-resiko terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil kerjasama tersebut, menurut **Adiwarman karim** dapat dilakukan identifikasi resiko yang dapat dilakukan bank Islam maupun dalam praktik bagi hasil dilapangan hampir sama yakni:⁹⁴

- 
- a. Proses transaksi pembiayaan atau pelaksanaan, karakteristik bank Islam dalam pelaksanaanya setidaknya terlihat pada tiga aspek yaitu proses transaksi perbankan syariah, proses transaksi bagi hasil, dan proses devisa.
 - b. Proses manajemen.
 - c. Sumber daya manusia.
 - d. Kerusakan.

Sedangkan akad *mudharabah* dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal (berakhir), atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

⁹⁴ Trisandini P Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 29.

- b. Salah satu yang berakad meninggal dunia.⁹⁵ Menurut jumhur ulam jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Selain itu juga *mudharabah* tidak dapat diwariskan
- c. Salah satu yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah akad *mudharabah* menjadi batal.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebelum dikelola oleh pekerja (pelaksana).

Dalam suatu kerjasama *mudharabah* maka banyak hal yang bisa menyebabkan kerjasama tersebut batal, seperti beberapa hal yang disebutkan di atas.

⁹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Loc, cit*, h. 7.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank nasional yang disominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁹⁶

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

⁹⁶ Website resmi PT Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 21:00 WIB.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1991. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya

melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sendiri berdiri pada tanggal 20 Februari 2011 dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Februari 2011 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan, dimana di daerah tersebut sebelumnya tidak ada lembaga keuangan yang bersifat syariah. PT Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ini adalah pecahan dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Baturaja yang terletak di Jl. Slamet Riadi, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Semakin lama nasabah Bank Syariah Mandiri semakin banyak sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Reza Fahlevi Rahmad, *Branch Operation and Service Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

2. Profil PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Belitang

a. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 5 Pasar Gumawang,
Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera
Selatan.

Telepon : (0735) 450161 :

Situs Web : www.syariahmandiri.co.id

Tanggal Awal Beroperasi: 22 Februari 2011

Jumlah Karyawan : 25 Karyawan

b. Letak Geografis :

Lokasi Bank Syariah Mandiri KCP Belitang merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Nusa Indah No. 5 Pasar Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Terletak di lingkungan penduduk yang mengandalkan kehidupan pasar, perdagangan dan bisnis.

3. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Belitang⁹⁸

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Bank syariah terdepan dan modern

⁹⁸ Arsip dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Belitang

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, mententramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi Bank Syariah Mandiri

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

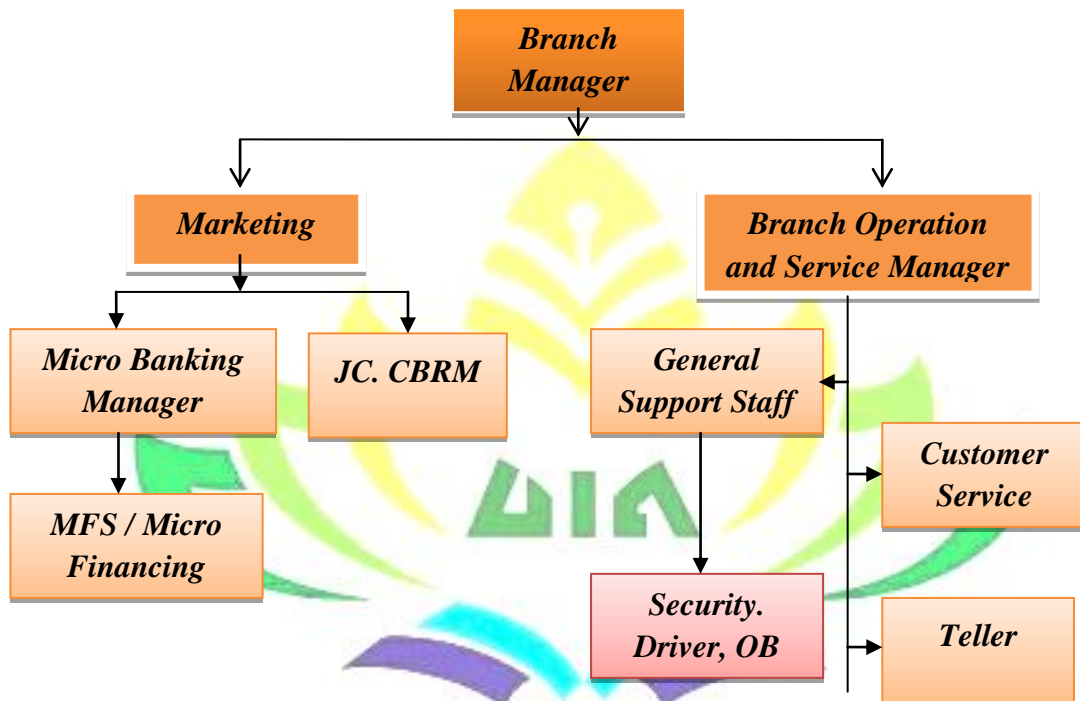
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Belitang

Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Belitang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :⁹⁹



Gambar 4
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Belitang

Nama Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Belitang:

Branch Manager	: Abdul Hamid Rahmatullah
Branch Operation and Service Manager	: Reza Fahlevi Rahmad
Micro Banking Manager	: Achmad Rifai Yudhia
MFS (Micro Fianncing Sales)	: Sanusi, Reza Pratama Putra
JI. CBRM	: Herda Dinata
General Support staff	: Yunita Apriyani

⁹⁹Arsip Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Belitang.

Customer Service : Ilhamoko

Teller : Meiza Putri Lestari,
Nadia Sary R

Security : Fitriadi, Hamdani, Rizky F

Driver : Siswa handayani

OB : Jaka Orlando

5. Produk dan Layanan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Belitang¹⁰⁰

a. Produk Simpanan

Adapun produk simpanan yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Belitang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Produk Simpanan BSM KCP Belitang

1) Tabungan BSM	8) Tabungan Mabrur
2) BSM Tabungan Berencana	9) Tabungan Mabrur Junior
3) BSM Tabungan Simpatik	10) Tabungan Saham Syariah
4) BSM Tabungan Dollar	11) Tabungan Giro
5) BSM Tabungan Pensiun	12) Tabungan Giro Valas
6) BSM Tabunganku	13) Tabungan Deposito
7) BSM Tabungan Investa Cendekia	14) Tabungan Deposito Valas

¹⁰⁰ Arsip dokumen produk dan layanan Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

b. Produk Pembiayaan Konsumen

Adapun Produk Pembiayaan Konsumen yang disediakan oleh BSM KCP Belitang antara lain sebagai berikut :

- 1) BSM Implan
- 2) Pembiayaan Kepada Pensiunan
- 3) Pembiayaan Griya BSM
- 4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

c. Produk Pembiayaan Komersial

Adapun Produk Pembiayaan Komersial yang disediakan oleh BSM KCP Belitang antara lain sebagai berikut :

- 1) Reksadana
- 2) Sukuk Negara Retail
- 3) Pasar Perdana
- 4) Pasar Sekunder
- 5) Sukuk Tabungan

d. Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh BSM KCP Belitang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Nama Fasilitas Jasa BSM KCP Belitang

1) BSM Card	13) BSM Intercity Clearing
2) BSM Sentra Bayar	14) BSM RTGS Real Time Groos Settlement
3) BSM SMS Banking	15) Transfer Dalam Kota (LLG)
4) BSM Mobile Banking	16) BSM Transfer Valas
5) BSM Jual Beli Valas	

6) BSM Electronic Payroll	17) BSM Pajak Online
7) Transfer Uang Tunai	18) BSM Referensi Bank
8) BSM E-money	19) BSM Standing Order
9) BSM Transfer Lintas Negara	20) BSM Payment Point
Westren Union	21) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)
10) BSM Kliring	22) Pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM (PPBA)
11) BSM Inkaso	
12) BSM Net Banking	

(Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)

B. Mengenal Produk Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri

1. Pengertian Tabungan Mabrur

Bank Syariah Mandiri menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Tabungan mabrur menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank mengelola dana dari nasabah kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut bank memberikan hasil usahanya sesuai kesepakatan. Bagi hasil yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang sebesar 85% : 15%, dimana pihak bank menerima sebesar 85% dan nasabah menerima

sebesar 15%.¹⁰¹ Pembagian hasil tersebut diberikan setiap akhir bulannya dan bisa berubah-ubah sesuai keuntungan bank dalam pengelolaan dana oleh bank.

Tabungan mabrur menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk pendaftaran pengisian formulir pembukaan rekening tabungan mabrur diisi dengan data identitas diri secara lengkap. Adapun setoran awal dan setoran selanjutnya untuk tabungan mabrur minimal Rp. 100.000. Setelah mencapai Rp. 25.100.000 nasabah akan didaftarkan ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan masa tunggu pemberangkatan selama 13 tahun.

2. Ketentuan Umum Mengenai Tabungan Mabrur¹⁰²

a. Penabung

- 1) Penabung adalah umat Islam (perorangan) yang berminat menunaikan ibadah haji.
- 2) Penabung harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM/identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank.
- 3) Sebaiknya penabung bertempat tinggal pada wilayah Kabupaten/Kotamadya yang sama dengan lokasi atau alamat Cabang Bank Syariah Mandiri.

b. Penabung mendapatkan buku Ttabungan Mabrur Haji dan Umrah sebagai bukti laporan mutasi rekening.

c. Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah.

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Ilhamoko Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

¹⁰² Prosedur Kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

- d. Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung.
- e. Dana penabung tidak dapat diganti oleh data orang lain.
- f. Tidak memperoleh fasilitas ATM dan Auto Debet/pendebetan otomatis.
- g. Bagi penabung yang batal karena penabung meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewaris hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
- h. Bagi penabung yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.
- i. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada buku tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukaan Bank Syariah Mandiri, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Syariah Mandiri.
- j. Jika buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Syariah Mandiri dengan melampirkan Surat Kehilangan dan Bank akan mengeluarkan buku tabungan baru.

3. Manfaat Tabungan Mabror

- a. Aman dan terjamin.
- b. Kemudahan perencanaan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- c. Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

4. Fitur Tabungan Mabror¹⁰³

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- c. Setoran awal minimal Rp. 100.000.
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.
- e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
- f. Notifikasi reminder saldo melalui email atau sms apabila saldo sudah mencapai Rp. 25.500.000.
- g. Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000.
- h. Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri.

5. Persyaratan Tabungan Mabror

- a. Menunjukkan Identitas (KTP/ SIM/ Paspor yang masih berlaku) dan menyerahkan *fotocopy* bukti identitas tersebut.

¹⁰³ Website resmi PT Bank Syariah Mandiri: www.syariahamandiri.co.id, diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 21:00 WIB.

- b. Menunjukkan asli Kartu Keluarga (KK)/ Akta Kelahiran/ Kartu Pelajar dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK)/ Akta Kelahiran/ Kartu Pelajar tersebut.

6. Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Mabrut¹⁰⁴

a. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Mabrut

- 1) *Customer service* menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik tabungan mabrut, seperti setoran awal, setoran selanjutnya, akad, nisbah bagi hasil dan sebagainya.
- 2) Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak bank sebagai data nasabah, hal yang harus diisi dalam formulir tersebut seperti:
 - a) Nama lengkap
 - b) Tempat tanggal lahir
 - c) Nama ibu kandungAlamat sesuai dengan kartu identitas
 - d) Agama
 - e) Pekerjaan
 - f) Penghasilan
 - g) Pernyataan bahwa tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang
 - h) Akad yang digunakan untuk tabungan mabrut sendiri menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berdasarkan prinsip bagi hasil

¹⁰⁴ Prosedur Kebijakan Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

- i) Mengisi kesepakatan nisbah. Untuk tabungan mabrur, nisbah yang ditentukan adalah sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank.
 - j) *Customer service* memberikan nomor rekening dan nomor rekening dan nomor CIF
- 3) Memberikan tanda tangan pada Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) sebanyak dua lembar dengan dua tangan di setiap lembarnya.
 - 4) CS memberikan cap verifikasi pada setiap tanda tangan calon nasabah, baik di formulir KCTT
 - 5) CS memberikan cap “SESUAI DENGAN ASLINYA” pada fotokopi KTP dan NPWP
 - 6) Salah satu KCTT diberikan lampiran fotokopi KTP dan NPWP untuk arsip teller
 - 7) CS menuliskan nama dan nomor rekening pada buku tabungan dan meminta calon nasabah untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungan
 - 8) Buku tabungan ditandatangani oleh *Supervisor* untuk diotorisasi. Untuk di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang disetujui oleh (*Operastional Officer-nya*)
 - 9) Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000. Nasabah juga dapat melakukan setoran awal langsung sebesar Rp. 25.100.000 setelah itu nasabah mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan akan

mendapat SPIH kemudian diserahkan ke bank untuk penertiban BPPH sehingga nasabah dapat langsung mengetahui nomor porsi haji

10) Nasabah mendapat buku tabungan.

b. Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

- 1) Penutupan rekening Tabungan Haji dilakukan nasabah setelah dilakukannya pelunasan setoran haji, dan penutupan tidak boleh melebihi 6 bulan sejak proses pelunasan.
- 2) Bank akan mengirim pemberitahuan kepada nasabah melalui media tertentu untuk melakukan penutupan Tabungan Haji di kantor cabang pembuka rekening.
- 3) Bank akan melakukan penutupan rekening Tabungan Haji secara otomatis apabila selama 12 bulan berturut-turut rekening Tabungan Haji nasabah bersaldo nihil, terhitung sejak proses pelunasan setoran haji.

Setiap pendaftar Tabungan Mabrur akan memperoleh manfaat diantaranya notifikasi saldo melalui email atau sms apabila saldo telah mencapai Rp. 25.500.000. Selanjutnya dapat mendaftarkan nomor porsi melalui aplikasi SISKOHAT.

Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, akan tetapi tabungan mabrur yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP belitang ini untuk tabungan hajinya sudah terlaksana, sedangkan untuk tabungan umrahnya

belum terlaksana, ini dikarenakan lokasi bank berada di kota madya dan belum ada kerjasama dengan agen travel yang sudah legal.¹⁰⁵

Tabungan mabrur ini di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang cukup banyak masyarakat yang mempercayakan dananya di bank tersebut. Terbukti dengan jumlah nasabah yang menabung di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ini pada tahun 2011 sampai 2014 berjumlah 3.812 nasabah tabungan mabrur. Akan tetapi pada tahun 2015, jumlah nasabah tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mengalami penurunan.

Berikut jumlah nasabah tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang:¹⁰⁶

Tabel 3.3
Jumlah Nasabah Tabungan Mabrur BSM KCP Belitang

Tahun Bulan	2015	2016	2017
Januari	25	21	27
Februari	29	25	25
Maret	31	32	22
April	35	30	19
Mei	30	28	26
Juni	27	33	29
Juli	32	39	34

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Ilhamoko, *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

¹⁰⁶ Data pembukaan tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

Agustus	36	31	39
September	48	43	42
Oktober	45	28	38
November	39	35	32
Desember	23	26	25
Jumlah	400	371	358

(Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)

Dari tabel jumlah nasabah tabungan mabrur BSM KCP Belitang di atas, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah tabungan tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah nasabah tabungan mabrur mendapatkan 400 nasabah, dan mengalami penurunan 371 nasabah di tahun 2016 dan di tahun 2017 turun menjadi 358 nasabah. Penurunan jumlah nasabah tabungan mabrur ini karena tidak diberlakukan lagi pemberian dana talangan haji.

Berikut adalah jumlah simpanan dana nasabah produk tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang:¹⁰⁷

Tabel 4.1
Jumlah Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang

Tahun Bulan	2012	2013	2014
Januari	12.832.673,41	5.104.830,31	30.688.366,95
Februari	25.500.705,89	11.997.977,52	22.224.916,39
Maret	34.509.076,46	26.941.249,11	4.624.878,17
April	48.399.055,29	21.596.551,05	4.442.072,01

¹⁰⁷ Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

Mei	33.989.671,88	21.518.895,56	27.794.113,35
Juni	17.896.437,29	32.906.042,68	32.999.998,35
Juli	40.338.560,77	70.530.829,83	44.467.103,42
Agustus	49.971.523,15	22.019.318,85	56.940.095,45
September	128.769.321,51	97.477.930,92	100.370.642,16
Oktober	70.982.670,38	71.425.879,14	55.017.874,23
November	54.184.639,33	46.987.066,16	37.283.848,52
Desember	8.114.862,13	10.313.711,71	9.645.226,28
Jumlah	522.489.197,49	438.820.282,84	426.454.135,28
Total	1.390.763.615,61		

(Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam 3 tahun operasional Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mengalami penurunan jumlah tabungan dari 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015, Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mampu menghimpun dana tabungan mabrur sebesar Rp. 522.489.197,49. Di tahun 2016, mengalami penurunan pendanaan menjadi Rp. 438.820.282,84, penurunan yang cukup besar. Pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2017, Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mengalami penuruna kembali untuk tabungan mabrur yaitu menjadi Rp. 426.454.135,28. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mampu menghimpun dana dari nasabah tabungan mabrur sebesar Rp. 1.390.763.615,61.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, memiliki makna bahwa penyediaan produk pembiayaan haji dalam hal ini tabungan haji, dan dalam fatwa tersebut poin 3 disebutkan, “Jasa pengurusan haji

yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji¹⁰⁸, maka di seluruh Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan untuk diadakannya penyediaan dana talangan haji, karena dapat menyebabkan penumpukan nomor porsi haji setiap tahunnya.

Dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam artian dana talangan haji ini ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Beberapa alasan dilarangnya dana talangan haji oleh pemerintah, diantaranya:¹⁰⁹

- a. Adanya dua akad dalam satu objek, yakni akad *ijarah* dan akad *qard*.
- b. Dana talangan haji dianggap sebagai penyebab antrean haji jadi puluhan tahun.
- c. Dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji yaitu mampu (*istitha'ah*).
- d. Dana talangan haji mengajak orang untuk berhutang.
- e. Bank mengenakan biaya atau ujrak layanan pengurusan saat haji berkaitan berdasarkan besarnya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.
- f. Dana talangan haji termasuk *takalluf* dan memberatkan.

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁰⁹ Wawancara Bapak Ilhamoko, *Customer Service* Bank syariah mandiri Cabang Belitang.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penerapan akad *Mudharabah* Tabungan Mabrur Bank Syariah Cabang Belitang

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang akad yang digunakan dalam tabungan mabrur yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dimana suatu akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*nasabah*) menyerahkan modal untuk berdagang atau dikelola usahakan oleh pihak kedua (*pengelola dana*) tanpa penentuan jenis usaha, waktu dan tempat usaha tersebut dan laba atau keuntungan di bagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk Tabuungan Haji sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹¹⁰

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dan tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan akad *mudharabah* pada tabungan mabrur ini mengacu pada hadist yang diriwayatkan dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pasal 5.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ لِشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib no. 2280, kitab at-Tijarah).¹¹¹

Indikasi dari hadist ini adalah adanya akad *mudharabah*, mitra usaha antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dan terdapat syarat yang mengikat, serta pertanggung jawaban pengelola (*mudharib*).

B. Penerapan Bagi Hasil Tabungan Mabruur dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang

Sistem bagi hasil tabungan mabruur yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Belitang adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu dimana pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usahanya kecil. Hal ini berbeda

¹¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *sunan Ibni Majah*, (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/163, hadis Nomor 2377.

dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dengan jumlah tetap, tidak terpengaruhi dengan pendapatan yang diterima bank konvensional.

Hasil pengelolaan dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya.¹¹²

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut di survei dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak, atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam.

Pada dasarnya dana haji itu boleh di kelola usahakan dengan jalan yang baik dan atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya dengan penyaluranan dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: 29)

¹¹² Wawancara dengan Bapak Ilhamoko, Customer Service Bank Syariah Mandiri KCP Belitang.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹³

Dalam ayat diatas, sudah jelas disebutkan bahwa harta itu bisa dikelola dengan jalan perniagaan dengan asas suka atau kesepakatan bersama, dan kaitannya dengan tabungan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang, bahwa sudah ada kesepakatan antara nasabah tabungan haji dalam hal ini pemilik dana dengan pihak bank bahwa akan dilakukannya pengelola usaha dengan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan di bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, dan tentunya penyaluran dananya pun digunakan untuk jalan perniagaan yang sesuai dengan syariah.

Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- a. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan haji *mudharabah* sebesar 15% : 85%, jadi 15% untuk *shohibul maal* (nasabah) dan 85% untuk *mudharib* (BSM KCP Belitang).

¹¹³ Al-Jumatul Ali, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h. 83.

Tabel 4.2
Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
Mandiri KCP Belitang

Produk	Nasabah Bank Syariah	Bank Syariah
Tabungan Mabrur BSM	15%	85%

(Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)

Makin tinggi nisbah bagi hasil maka jasa yang ditawarkan menarik bagi konsumen untuk memutuskan membeli. Kejelasan kesepakatan seperti penentuan bagi hasil serta jaminan dalam pembukaan rekening menentukan konsumen menggunakan atau tidak menggunakan jasa tabungan tersebut.

- b. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

No/tgl	Snd	Debet Rp	Kredit	Saldo	Val
1/01/12			1.000.000	1.000.000	
5/01/12			1.000.000	2.000.000	
11/01/12			1.000.000	3.000.000	
21/01/12			1.000.000	4.000.000	

(Sumber: data diolah dan lopran keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut:

$$01/03/12-4/03/12 = 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000$$

$$05/03/12-10/03/12 = 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000$$

$$11/03/12-20/03/12 = 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000$$

$$21/03/12-31/03/12 = 11 \text{ hari} \times 4.000.000 = 44.000.000$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = 90.000.000$$

Sehingga saldo rata-rata harian $90.000.000 : 31 \text{ hari} = 2.903.225,8$

- c. Menghitung total rata-rata harian tabungan haji nasabah.
- d. Menghitung jumlah pendapatan BSM KCP Belitang diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, *wakalah*, dan pendapatan lain-lainnya. Perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*).

Dengan mengetahui hasil akhir dari empat langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang adalah:

Rumus perhitungan bagi hasil:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tab. haji anggota}}{\text{Total saldo rata-rata haji harian}}$$

Cara perhitungan untuk nasabah adalah:

- Bagi hasil kotor = bagi hasil nasabah = Rp. AA
- Zakat 2,5% (bila ada) = Rp. AA x 2,5% = Rp. BB
- Bagi Hasil setelah zakat = Rp. AA - Rp. BB = Rp. CC
- Pajak (20%) = Rp. CC x 20% = Rp. DD
- Bagi hasil netto = Rp. CC - Rp. DD = Rp. EE

Berikut perhitungan bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah:

1. Pak Budi mempunyai rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dengan saldo rata-rata tabungan hajinya Rp.

2.903.225,8 saldo rata-rata dan total tabungan *mudharabah* sebesar Rp.90.000.000 dan memperoleh pendapatan sebesar Rp.1.105.495.000. Perbandingan bagi hasil antara BSM dan Pak Budi yaitu 85% : 15%. Dengan data ini dapat menghitung berapa persentase bagi hasil BSM dalam tabungan haji *mudharabah* selama bulan mei, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh bapak Budi.

Jawab:

Persentase bagi hasil BSM Cabang Belitang adalah sebagai berikut:

Bagi hasil BSM Belitang:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{1.105.495.000 \times 85\% \times 2.903.225,8}{90.000.000} = \text{Rp. 30.311}$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{1.105.495.000 \times 15\% \times 2.903.225,8}{90.000.000} = \text{Rp. 5.349}$$

- Bagi hasil kotor = Rp. 5.349 = Rp. 5.349
- Zakat 2,5 (bila ada) = Rp. 5.349 x 0,025 = Rp. 1337
- Bagi hasil setelah pajak = Rp. 5.349 – Rp. 1337 = Rp. 4012
- Pajak (20%) = Rp. 4012 x 0,2 = Rp. 802
- Bagi hasil netto = Rp. 4012 – Rp. 802 = Rp. 3.210

2. Perbandingan Rata-rata Tabungan Haji Nasabah

Dimisalkan pada bulan Mei ada dua penabung yaitu A dan B, yang sama-sama mempunyai rekening di BSM Cabnag Belitang dengan saldo Rp. 5.000.000 dengan pendaptan bank sebesar Rp. 1.034.024, penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan

penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26, bagi hasil sebesar 85% : 15%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan dibawah ini:

Nasabah A	Nasabah B
01/05/12-31/05/12 = 5.000.000	26/05/12-31/05/12
= 31 hari x 5.000.000 = 155.000.000	= 6 hari x 5.000.000 = 30.000.000
Saldo rata-rata tabungan	Saldo rata-rata tabungan
= 155.000.000 : 31 hari = 5.000.000	= 30.000.000 : 31 hari = 961.724

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Nasabah A:

Bagi Hasil BSM Cabang Belitang:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{1.034.024 \times 85\% \times 5.000.000}{155.000.000} = \text{Rp. 28.352}$$

Bagi Hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{1.034.024 \times 15\% \times 5.000.000}{155.000.000} = \text{Rp. 5003}$$

Penabung B:

Bagi hasil BSM Cabang Belitang:

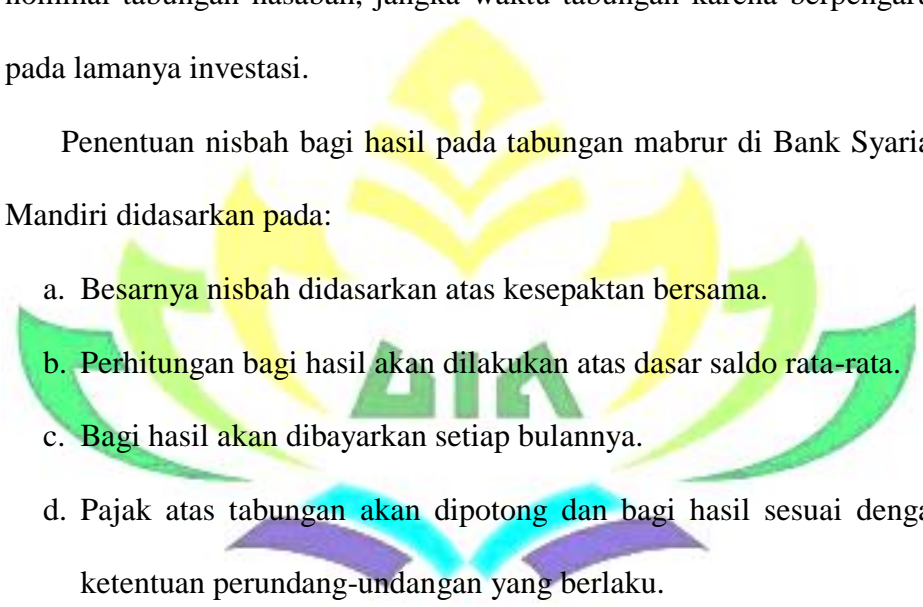
$$\text{Bagi hasil} = \frac{1.034.024 \times 85\% \times 5.000.000}{30.000.000} = \text{Rp. 14.648}$$

Bagi hasil nasabah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{1.034.024 \times 15\% \times 5.000.000}{30.000.000} = \text{Rp. 2.850}$$

Pada Bank Syariah Mandiri Cabang dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan haji *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan atau didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu juga pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri didasarkan pada:

- 
- a. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.
 - b. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
 - c. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya.
 - d. Pajak atas tabungan akan dipotong dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur keadilan, dimana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepada bank. Hal ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi nasabah juga bank sebagai pengelola. Sistem bagi hasil menguntungkan peminjam terutama ketika kondisi perekonomian yang sulit, sehingga dapat membantu memperkecil resiko. Kedua, pemodal diuntungkan melalui kemampuan bank untuk mengelola dana yang disimpan dan diputar bank kepada para pengusaha dan investor,

shingga semua pihak dapat menerima manfaat dan perlakukan adil sebagaimana yang diterapkan dalam Islam.

Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah kemudian bank sebagai pengelola akan mengembangkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk usaha-usaha yang baik secara profesional.
- b. Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana maupun bank.
- c. Prinsip ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, dengan demikian nasabah akan merasakan ketrentaman lahir maupun batin.

Berdasarkan aspek-aspek dalam tabungan haji *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Deskripsi Data
Produk Tabungan Mabruur *Mudharabah* BSM KCP Belitang

ASPEK	TABUNGAN HAJI
1. Transaksi <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip atau Akad - Fasilitas - Setoran - Penutupan 	<i>Mudharabah Muthlaqah</i> Buku Tabungan Ada penambahan Ketika saldonya menjadi nol
2. Bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> - Sistem - Nisbah - Perhitungan - Syarat perolehan 	<i>Revenue Sharing</i> 85% : 15% Menggunakan rata-rata harian Minimal saldo Rp. 100.000
3. Distribusi <ul style="list-style-type: none"> - Waktu - Pembagian 	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo tabungan nasabah
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana yang tersedia untuk ditabung, pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya investasi.
5. Ditinjau dari Ekonomi Islam	Prinsip keadilan dan kehati-hatian, Prinsip Keadilan, Prinsip ketentraman..

Sumber: data Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang

BAB V

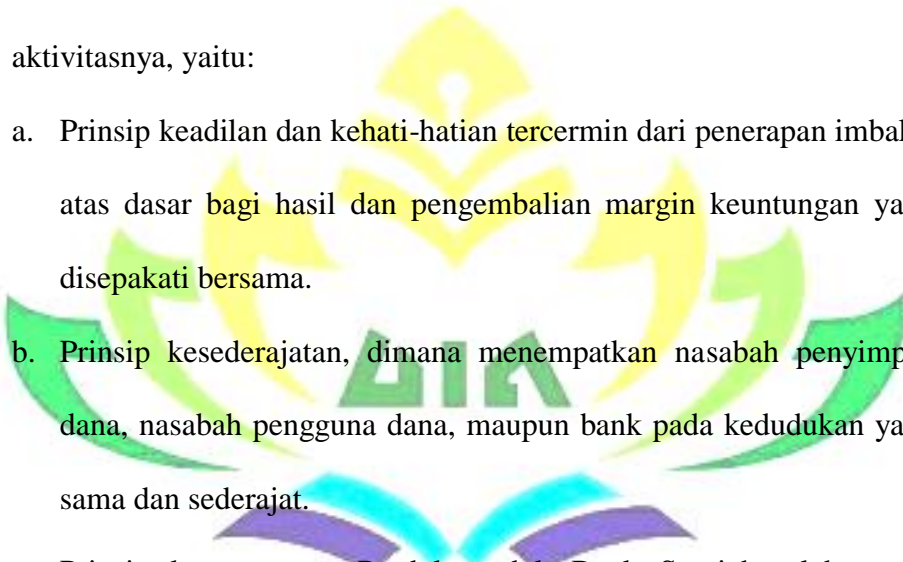
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur melalui akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang berjalan berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pihak pengelola (*mudharib*), dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana. Nasabah menyerahkan dananya ke pihak bank tanpa mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang besar.
2. Tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu:

- 
- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama.
 - b. Prinsip kesederajatan, dimana menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat.
 - c. Prinsip ketentraman. Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah Muamalah Islam.

2. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan, baik untuk Lembaga keuangan Syariah maupun masyarakat pada umumnya, yakni:

1. Produk Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah pilihan tepat untuk masyarakat Islam yang hendak melaksanakan atau baru merencanakan keberangkatannya untuk melaksanakan ibadah haji.

2. Melakukan sosialisai kepada masyarakat yang belum atau kurang memahami mengenai produk-produk Bank syariah misalnya produk Tabungan haji dan pemakaian akad setiap produknya, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menunaikan haji dan menjadi nasabah Bank Syariah serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.
3. Sebaiknya pihak bank memberikan pemahaman kepada para nasabah karena belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan (*revenue sharing*), disamping untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara terperinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana.
4. Sebaiknya pihak bank memberikan batas waktu lama setoran nasabah dalam memenuhi dananya sebesar Rp. 25.100.000,- untuk dapat didaftarkan ke SISKOHAT, sehingga nasabah dapat memperkirakan dan merperhitungkan besar dana yang disetorkan kepada bank setiap bulannya serta dapat mempercepat nasabah untuk mendaftar haji.
5. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti mengenai sistem pendistribusian bagi hasil pada produk tabungan haji, karena penelitian ini hanya membahas sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada produk tabungan haji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Arif, M. Nur Al, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbitan Alfabeta, 2012.
- E Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, Implementasi, dan Inovasi) Ct. 9* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktik*. Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach 2*. Yogyakarta: AndLOffset, 1990.
- Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ali dan M. Naratuzzaman, *Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lewis, Mervin K dan Latifa M Algaoud. *Perbankan Syariah*, terjemahan Burhan Subrata. Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA, 2007.

- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (cet. X). Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nuroboko, Cholid dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2012.
- Ritonga, A Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Suhandi, Handi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Tim Pengembang Perbankan Syariah Institusi Bankir Inonesia. *Bank Syariah: Konsep Praktek dan Implentasi*. Jakarta: Djambatan, 2001.

- Trisandini P Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015.
- Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.

KARYA ILMIAH

- Akhlis Farida Kurnia Rahma. “Analisis pada Produk Tabungan Baitullah iB Hasanah di BNI Syariah”. Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Syariah. Semarang: STAIN Salatiga, 2014.
- Dias Wahyuningsih, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Jalaludin Mustafa, “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah KC Semarang”. Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Pandu Panuntun, “Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”. Skripsi Konsentrasi Lembaga Keuangan Syariah Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Yosep Baskoro Widiasto. “Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Jasa Tabungan Bank Syariah di BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”. Jurnal Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum. Yogyakarta: Universitas ATMA JAYA, 2016.

AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan terjemahan (Al-Jumatul Ali). Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 10 ayat (2)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) dan (13).

Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya.

PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 dan 7.

SE.BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bagian III angka 1.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/163 tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji.

WEBSITE

Website resmi PT Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 21:00 WIB.

Lampiran 1

Kerangka Wawancara *Customer Service*

1. Apakah di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang ada produk tabungan haji?
2. Apa yang dimaksud dengan tabungan mabrur?
3. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan mabrur?
4. Akad apa yang diterapkan dalam produk tabungan mabrur?
5. Kenapa produk tabungan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang tidak terlaksana?
6. Berapa nisbah bagi hasil yang Bank Syariah Mandiri KCP Belitang berikan?
7. Berapa nasabah untuk produk tabungan mabrur?
8. Apakah dari tahun ke tahun nasabah tabungan mabrur naik?
9. Bagaimana Bank Syariah Mandiri KCP Belitang mengelola dana nasabah dari produk tabungan mabrur?
10. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang?
11. Bagaimana perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Belitang?
12. Kapan pihak Bank memberikan bagi hasilnya kepada nasabah?
13. Bagaimana sistem pembagian hasil usaha produk tabungan mabrur dengan akad *mudharabah*?
14. Apakah penerapan akad pada produk tabungan mabrur sudah sesuai dengan prinsip syariah?

Lampiran 2

Kerangka Wawancara Nasabah

1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya produk tabungan mabrur ini?
2. Kenapa Bapak/Ibu tertarik menabung atau menginvestasikan dananya di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang?
3. Bagaimana sistem pelayanan di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang terkhusus pelayanan dalam produk tabungan mabrur?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem pengelolaan dana yang telah diinvestasikan?
5. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan bagi hasil setiap bulannya?
6. Apakah Bapak/Ibu paham akan penggunaan akad *mudharabah* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang?
7. Apa harapan Bapak/Ibu setelah menginvestasikan dananya untuk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang?

\